

Judul : Beras Bulog Dioplos : Usut Tuntas Dong, Tangkap Dalangnya
Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Beras Bulog Dioplos Usut Tuntas Dong, Tangkap Dalangnya

ANGGOTA Komisi IV DPR Slamet meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas terhadap setiap aksi curang dalam tata niaga pangan. Penindakan hukum perlu terus memburu siapa di balik praktik curang seperti ini. Tangkap, lalu penjarakan," tegas Slamet, kemarin.

"Kita sangat bersyukur dengan terbongkarnya sindikat pengoplos beras ini. Namun, penegak hukum perlu terus memburu siapa di balik praktik curang seperti ini. Tangkap, lalu penjarakan," tegas Slamet, kemarin.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polda Banten berhasil membongkar aksi curang sejumlah pedagang beras yang menjual beras impor milik Bulog dengan harga sangat tinggi.

Dalam aksinya, para pelaku membeli beras untuk Operasi Pasar milik Bulog seharga Rp 8.300 per kilogram. Beras itu lalu dioplos dan mengganti kemasannya menjadi beras premium dan dijual seharga Rp 12.000 per kilogram.

Slamet berharap, upaya Satgas membongkar aksi kartel oknum pedagang beras ini terus dilakukan. Apalagi aksi kartel para oknum pedagang ini tidak hanya merugikan negara tapi juga masyarakat. Di saat Pemerintah berupaya melakukan stabilisasi pasar melalui kebijakan impor beras, justru dimanfaatkan para pelaku mendapatkan beras murah yang kemudian dioplos.

"Kita ingin para mafia ini dikenakan hukuman yang berat karena sudah sengaja merugikan negara serta konsumen untuk kepentingan pribadi," tegas politisi Fraksi PKS ini.

Diketahui, Satgas Pangan Polda Banten bersama Bulog menangkap tujuh tersangka pelaku tindak pidana perlindungan konsumen dan persaingan dagang. Mereka diketahui melakukan penyimpanan atau kecurangan terhadap distribusi beras bulog di wilayah hukum Polda Banten.

Para tersangka diduga melakukan repacking beras Bulog menjadi beras premium dengan berbagai merek. Beras oplosan tersebut kemudian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Para tersangka juga memanipulasi Delivery Order (DO) dari distributor maupun mitra Bulog, masuk ke tempat penggilingan padi seolah-olah merek sendiri. Barang bukti yang berhasil diungkap dalam kasus ini seba-

nyak 350 ton beras bulog.

Dirut Bulog Budi Waseso mengapresiasi Polda Banten yang berhasil menangkap para tersangka ini atas tindak lanjut inspeksi mendadak di Pasar Induk Beras Cipinang.

"Apa yang saya sampaikan minggu lalu terbukti hari ini. Saya yakin hal ini akan diurut oleh Kepolisian tentang siapa dalangnya dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," kata Budi.

Sementara, Dosen Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai, kenaikan harga beras saat ini lebih disebabkan persoalan tata kelola niaga beras yang buruk.

Dia lalu menyoroti anomali kenaikan harga beras padahal Pemerintah sudah melakukan impor untuk stabilisasi harga di pasaran. Sementara di sisi lain, banyak sentra padi sudah mulai melakukan panen raya.

"Kondisi harga dan stok beras ini akibat kelalaian Bulog yang merupakan satu-satunya institusi negara yang bertugas menyiapkan cadangan beras pemerintah dan menstabilkan harga," kata Gandhi.

Kondisi ini, lanjut Gandhi, diperkuat dengan temuan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia bahwa lonjakan harga beras disebabkan kesalahan Bulog tidak melakukan penyerapan di awal tahun.

Sesuai hukum ekonomi, ketidakcekan Bulog dalam menyerap gabah/beras di awal 2023 tersebut otomatis mempengaruhi harga di pasar.

Bulog tidak bisa beralasan tidak menyerap beras karena panen padi dimulai bulan Januari hingga April. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), prognosis panen padi Februari 2023 seluas 1 juta hektare dan Maret seluas 1,9 juta hektare.

"Panen di Januari tentunya untuk kebutuhan atau memasok pasar di bulan Februari sehingga serapan di Januari menjadi sangat penting untuk saat ini," jelasnya.

Berdasarkan data BPS, produksi beras di Jawa Barat hasil panen padi pada Februari dan Maret masing-masing 392.805 ton dan 893.428 ton.

Di Banten, pada Februari dan Maret masing-masing 153.386 ton dan 180.500 ton. Di Jawa Tengah pada Februari dan Maret masing-masing 793.284 ton dan 1,23 juta ton. ■ KAL